



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa produk hukum berbentuk Peraturan Daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan bentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas Pembentukan rancangan perda dan skala rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda APBD yang ditetapkan dengan keputusan DPR Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahunm 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah mKonstitusi Republik Indonesia Nomor018/PPU-1/2003;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan 40 (empat puluh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (RAPERDASI) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RAPERDASUS) pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Program Propemperda sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA BARAT



KETUA

ORGENES WONGGOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

NOMOR : 38 Tahun 2022

TANGGAL : 7 Desember 2022

TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PADA PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	DISERTASI NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN LAIN	UNIT INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMP ALAN	KET
				BARU	UBAH						
1.	RAPERDA	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT	✓						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
2.	RAPERDA	KAWASAN STRATEGIS PROVINSI MAHKOTA PERMATA TANAH PAPUA	✓						BALITBANGDA		
3.	RAPERDA	SISTEM TAMBATAN KAPAL WISATA DI PROVINSI PAPUA BARAT	✓						BALITBANGDA		
4.	RAPERDA	PETA JALAN KETAHANAN PANGAN DI PAPUA BARAT	✓						BALITBANGDA		
5.	RAPERDA	PROTOKOL INVESTASI DI PAPUA BARAT	✓						BALITBANGDA		
6.	RAPERDA	PENATAAN PENGELOLAAN HUTAN DI PAPUA BARAT	✓						BALITBANGDA		
7.	RAPERDA	PENERTIBAN KENDARAAN PLAT LUAR DAERAH DI	✓						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

		PROVINSI PAPUA BARAT									
8.	RAPERDA	PENERTIBAN	✓							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
9.	RAPERDA	TENAGA KERJA KONSTRUKSI TIDAK BERSETIFIKAT KEAHLIAN DI PROVINSI PAPUA BARAT	✓							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
10.	RAPERDA	PENATAAN DAN PENERBITAN AKTIFITAS SOSIAL EKONOMI PADA RUAS JALAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT	✓							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
11.	RAPERDA	KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PEMADAM KEBAKARAN DAN KEGAWATAN DAERAH	✓							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
12.	RAPERDA	RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	✓							DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
13.	RAPERDASUS	MINERBA PROVINSI PAPUA BARAT	✓							BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	
14.	RAPERDASI	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT PAPUA	✓							BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	
15.	RAPERDASI	BADAN KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	✓							BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	

16.	RAPERDA	SOP BANTUAN HIBAH/BANSOS OTONOMI KHUSUS	✓						BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS		
17.	RAPERDASI	PERUBAHAN DAN PERHITHUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI PAPUA BARAT	✓						BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS		
18.	RAPERDASI	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PERUBAHAN DAN PERHITUNGANNYA, SERTA PERTANGGUNGJAW ABAN DAN PENGAWASANNYA	✓						BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS		
19.	RAPERDASUS/ SI	KEWENANGAN PROVINSI PAPUA MENCAKUP KEWENANGAN DALAM SELURUH BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN KHUSUS	✓						BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS		
20.	RAPERDASUS	LAMBANG DAERAH	✓						BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS		
21.	RAPERDASUS	KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	✓						BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS		
22.	RAPERDASUS/ SI	BIDANG SOSIAL	✓						BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS		

[illegible]

32.	RAPERDA	PENGOLAHAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT							DINAS KEHUTANAN		
33.	RAPERDA	PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA BARAT/ PAPUA BARAT DAYA							INISIATIF DPR PB		
34.	RAPERDA	PERLINDUNGAN TERHADAP SATWA DAN MARGA SATWA							INISIATIF DPR PB		
35.	RAPERDA	PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT							INISIATIF DPR PB		
36.	RAPERDA	GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT							DINAS KESEHATAN		
37.	RAPERDASI	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDASI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT							BIRO ORGANISASI		

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTASI	PENJELASAN ATAU KETERANGAN LAIN	UNIT INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KET
				BARU	UBAH						
1.	RAPERDA	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	✓						EKSEKUTIF		
2.	RAPERDA	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	✓						EKSEKUTIF		

3.	RAPERDA	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	✓							EKSEKUTIF		
----	---------	--	---	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT



KETUA

IRGENES WONGGOR